

PERSEPSI JEMAAT TENTANG KAUM DISABILITAS DAN AKSES MEREKA KE DALAM PELAYANAN GEREJA

Immanuel Teguh Harisantoso

Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana
immanuel.harisantoso@uksw.edu

Abstract. *This study explores the congregation's understanding of disability and their access to church services. The research subjects are taken from 53 congregations spread over 18 synods. The methodology used is descriptive qualitative with data collection techniques through open interviews, visiting participants directly, and communication technology media for participants who are not reached face to face. There were 6 informants involved in each congregation, consisting of one pastor and five church council members. The study's findings suggest that churches view disability as stereotyping, stigmatizing, and negative. The Church provides opportunities for disability involvement in ministry but in very limited opportunities. It provides normality criteria for people with disabilities to be able to serve.*

Keyword: *church, disability, accessibility of disability, church ministry*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman jemaat tentang disabilitas dan akses mereka ke dalam pelayanan gereja. Subyek penelitian diambil dari 53 jemaat yang tersebar pada 18 sinode. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terbuka, mendatangi langsung partisipan dan melalui media teknologi komunikasi bagi partisipan yang tidak terjangkau secara tatap muka. Informan yang dilibatkan pada setiap jemaat berjumlah 6 orang yang terdiri dari satu pendeta dan lima anggota majelis jemaat. Temuan penelitian ini menyatakan, gereja memandang disabilitas secara stereotipe, stigmatis dan kecenderungan memiliki penilaian negatif. Gereja memberikan kesempatan keterlibatan disabilitas dalam pelayanan, tetapi dalam kesempatan yang sangat terbatas. Ada kriteria-kriteria kenormalan yang digunakan bagi kaum disabilitas untuk dapat melayani.

Kata Kunci: gereja, disabilitas, aksesibilitas kaum disabilitas, pelayanan gereja

Di dalam *WHO Global Disability Action Plan 2014–2021: Better Health For All People With Disability* disebutkan bahwa disabilitas bersifat universal, memayungi berbagai berbagai kelemahan (*impairments*) fungsi tubuh, pembatasan aktivitas dan penolakan partisipasi yang merujuk pada aspek interaksi negatif antar individu (karena kondisi kesehatan) dan faktor konteks individu (lingkungan dan personal) (Sinulingga, 2016; WHO, 2015). Disabilitas merupakan persoalan yang “kompleks, dinamis, dan

mempunyai cakupan multidimensional” (World Bank and World Health Organisation, 2011, p. 3). *Booklet Ministry of Social Affairs*, dalam Demartoto mendefinisikan disabilitas sebagai, “kesulitan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun psikologis yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologis, maupun tubuh dan ketidakmampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang di hadapi.” (Demartoto, 2007, p. 10).

WHO membedakan tiga konsep yang merujuk pada disabilitas: *impairment* (kelemahan), *disability* (disabilitas), dan *handicap* (cacat). *Impairment* menunjukkan gangguan fungsi fisik atau mental pada tingkat organ, seperti kebutaan, amputasi, keterbelakangan mental, dan bisu. Disabilitas digambarkan sebagai konsekuensi dari kelemahan, menunjukkan pembatasan aktivitas: gangguan pribadi, seperti kesulitan melihat, berbicara, menggenggam, menggunakan toilet, atau ketidakmampuan menggunakan transportasi umum. Cacat menunjukkan arti kecacatan terhadap nilai-nilai masyarakat, misalnya, status rendah bagi mereka yang tidak dapat bergerak, yang mencerminkan penilaian negatif masyarakat terhadap kecacatan.

Ketiga istilah di atas saling berkaitan, seseorang dengan kelemahan (*impairment*) biasanya akan mengalami *disabilitas* dan *cacat*. Penting diperhatikan, “kelemahan” tidak selalu menghasilkan *disabilitas*, dan *disabilitas* juga tidak otomatis menjadi *cacat*” (Creamer, 2009, p. 14).

Misal, orang yang mengalami kerusakan indera penglihatan (*impairment*), tidak akan menjadi cacat (*handicap*), ketika ia hendak naik lift menjumpai petunjuk huruf *braille* dan karenanya iapun tidak mengalami *disabilitas* dalam persoalan ini.

Pada prinsipnya disabilitas bersifat netral (Marx, 2002), berbeda dengan istilah lain yang memiliki kecenderungan negatif, seperti: *handicapped* (cacat), *crippled* (lumpuh), *invalid* (penyandang cacat). Betapapun istilah ini sangat humanis, ide dasarnya adalah adanya bagian tubuh ataupun indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Raphael, 2008).

Tzvi C. Mark, mengingatkan perihal kecacatan manusia. Jikalau keabadian adalah kesempurnaan, maka kematian sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 2:17 dapat dilihat sebagai kecacatan bawaan manusia. Inilah kecacatan utama dan universal (Marx, 2002). Artinya betapapun indahnyanya dan kuatnyanya manusia ia tetaplah makhluk yang cacat secara konstitutif yang keberadaannya bersifat sementara. Kemunduran bertahap dari fungsi tubuh, seperti penglihatan, pendengaran, kekuatan seksual, refleks, ingatan dan lain-lain mengungkapkan bahwa manusia, meskipun diciptakan secara ilahi pada dasarnya mengalami kecacatan. Setiap orang akan mengalami *open minority* (Creamer, 2009). Gagasan ini disampaikan Creamer, setiap orang pernah mengalami kelemahan atau pada suatu waktu mereka akan mengalami *impairment* (kelemahan), sehingga baginya tidak tepat untuk memperdebatkan dan bahkan

mempertentangkan *disabilitas* dengan *abilitas*, karena secara temporer manusia akan mengalami disabilitas. Ada baiknya orang merefleksikan pengalaman hidupnya dalam keterbatasan yang dialaminya.

Goffman menyebut disabilitas sebagai bagian dari budaya eugenike, mereka yang mendapatkan persepsi negatif dikarenakan tidak dapat memenuhi harapan kenormalan dan karenanya mendapatkan stigma negatif (Goffman, 1963). Goffman menerapkan konsep stigma pada kelompok yang beragam seperti mereka yang menggunakan kruk, kursi roda, orang buta dan tuli atau mereka yang mengalami cacat fisik dan mereka yang memiliki penampilan atau perilaku yang melanggar ekspektasi mayoritas masyarakat, seperti pelacur atau ras minoritas. Stigma yang dimaksud secara kultural bersifat relatif dan berkaitan dengan nilai-nilai kelompok dominan (Darling, 2013). Stigma negatif merupakan pelabelan pada individu oleh ketidaksamaan dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang normal (Karuniasih et al., 2017). Situasi ini kemudian menjadi halangan komunikasi sosial disabilitas (Putra et al., 2021; Widyastutik, 2021). Olyan melihat disabilitas lebih merupakan hasil justifikasi stigmatisasi dan marginalisasi dan sekaligus lebih sebagai konstruksi sosial daripada bawaan lahir. Disabilitas adalah produk budaya yang berkontribusi secara signifikan terhadap generasi dan pemeliharaan ketidaksetaraan dalam masyarakat (Olyan, 2008).

Dalam *Concepts of Normality*, Wendy Lawson menyatakan bahwa menjadi disabilitas adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam

kehidupan bermasyarakat (Lawson, 2008). Disabilitas muncul dengan sendirinya dalam berbagai cara dan sebagian dari kita hidup dengan disabilitas, siapa diri kita adalah hal yang normal bagi kita. Untuk itu perlu pemahaman yang saling menghormati dalam hal aksesibilitas sumber daya, dukungan, tempat yang aman dan penghargaan terhadap perbedaan. Prinsip dasar perjuangannya adalah penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan seperti manusia.

Diskusi disabilitas bukanlah hal baru, meskipun demikian ia belum menjadi isu utama setara dengan isu-isu pelayanan lain di gereja. Gereja menunjukkan dua wajah terhadap disabilitas, satu menilai disabilitas sangat berharga dan karenanya membutuhkan pemberdayaan (Devi et al., 2021), tetapi praktiknya masih bertolak belakang (Sweety, 2021). Zandrato menyebutkan sebagai akibat pemahaman teologi yang keliru perihal disabilitas dan strategi pelayanan yang tidak tepat (Zandrato, 2018). Perlu dicari format yang tepat dalam pemberdayaan kaum disabilitas (Teddywono, 2020). Dalam surveynya terhadap gereja-gereja Baptis di Semarang Barat, Karmawati menemukan kenyataan bahwa gereja hanya sebatas memberikan hak layanan karitatif (Karnawati, 2020), tidak lebih dari itu. Subasno, Kaka dan Yulius memberikan perhatian pada persoalan sikap umat terhadap pemenuhan hak bagi kaum disabilitas (Subasno et al., 2020). Pertanyaan mendasar adalah bagaimana gereja memahami disabilitas dan sejauh mana gereja memberikan aksesibilitas dalam pelayanan? Berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah

dilakukan, yang hanya melihat disabilitas sebagai objek pelayanan dan terkait strategi pelayanan gereja terhadap disabilitas, penelitian ini akan mengurai bagaimana pemahaman gereja terhadap disabilitas dan sejauh mana disabilitas dilibatkan dalam pengumulan teologi dan pelayanan gereja.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian "Kelas Teologi Disabilitas" semester satu tahun ajaran 2021-2022 Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana yang diampu oleh penulis, diikuti oleh 53 mahasiswa. Para mahasiswa tersebut melakukan penelitian di jemaat asal masing-masing yang berarti terdapat 53 jemaat sebagai partisipan. Secara denominasi ke-53 jemaat tersebut tersebar di 18 sinode yaitu HKBP, GKJW, GKI, GKST, GKJ, GMIT, GMIM, GPM, GKE, GKPB, GKS, Gereja Toraja, GERMITA, GMIH, GPIBT, GPIB, GKSBS dan GBI. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak dianggap mewakili persepsi ke-18 sinode tersebut.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menyebarkan pertanyaan wawancara terbuka. Partisipan dalam penelitian ini dipilih dengan cara *purposive sample*, artinya sampel dipilih sesuai dengan kepentingan penelitian (Sugiyono, 2018). Pada setiap jemaat asal mahasiswa dipilih 6 orang informan, yaitu pendeta jemaat dan lima orang anggota majelis jemaat.

Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Oktober-4 November 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara tatap muka,

ber-telpon bagi yang tidak memungkinkan untuk bertemu dan juga melalui google form. Data dianalisa dengan menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi yang dikembangkan oleh Miles and Hubermann (Sugiyono, 2018).

HASIL PENELITIAN

Persepsi tentang Kaum Disabilitas

Gereja menyebut ragam istilah dan pemahaman yang merujuk kepada disabilitas (Widinarsih, 2019). Secara definitif dapat disimpulkan, disabilitas adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental dan intelektual; orang-orang yang mengalami kecacatan; orang yang tidak normal; memiliki kebutuhan khusus; mengalami keterbelakangan; orang penyakitan yang menyebabkan tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya; orang yang mempunyai keterbatasan yang menghambat interaksi sosial; pribadi yang diberkati oleh Tuhan dengan anugerah yang berbeda atau orang yang mempunyai kemampuan spesial.

Tabel 1. Persepsi Informan Tentang Pengertian Disabilitas

	Pengertian disabilitas
Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan fisik 2. Keterbatasan mental 3. Keterbatasan intelektual 4. Orang cacat 5. Tidak normal 6. Kebutuhan khusus 7. Keterbelakangan 8. Penyakitan 9. Tidak mampu berinteraksi 10. Orang yang terisolasi 11. Orang yang diberkati Tuhan 12. Orang spesial

Dari hasil penelitian, partisipan memiliki pemahaman negatif terhadap orang-orang dengan disabilitas. Mereka mendapatkan stereotipe dan stigma negatif sebagai yang tidak sempurna dan memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Cap “cacat” dan “tidak normal” semakin mendiskreditkan posisi disabilitas di tengah kehidupan dan pelayanan jemaat.

Akses Kaum Disabilitas Ke Dalam Pelayanan Gereja

Penulis akan menguraikan bagaimana gereja memahami disabilitas dan “memberikan” akses keterlibatannya dalam pelayanan. *Pertama*, disabilitas belum menjadi *need real* (isu) pelayanan gereja. Gereja belum memiliki dokumen-dokumen teologi, bahan ajar katekisasi ataupun pembekalan-pengayaan pelayan terkait isu-isu disabilitas. Selain penyediaan layanan pengajaran, gereja juga belum menyediakan kebutuhan arsitektur gereja yang dapat mengakomodasi kebutuhan disabilitas. Ketiadaan ajaran tentang disabilitas dan gedung gereja yang ramah disabilitas menunjukkan bahwa gereja belum memandang disabilitas sebagai isu sentral kesetaraan manusia sebagai kebutuhan pelayanan.

Kedua, disabilitas (tidak) termasuk warga gereja. Dapat dipastikan setiap gereja memiliki data warga: terkait jenis kelamin, baptis, sidi, status keluarga, pekerjaan, usia, rumah tinggal ataupun keahlian, tetapi ketika ditanya adakah data terkait warga yang mengalami disabilitas? Gereja tidak mempunyai data meskipun terdapat disabilitas. Pertanyaannya, mengapa tidak mendata mereka? Dengan ketiadaan data lengkap warga

disabilitas menggambarkan kepada kita sebuah sikap abai terhadap warga disabilitas atau gereja hanya sebatas memberikan layanan yang bersifat karitatif.

Ketiga, disabilitas bukan urusan gereja, melainkan tanggung jawab keluarga. Partisipan lebih melihat bahwa persoalan disabilitas lebih sebagai tanggungjawab keluarga daripada beban pelayanan bagi gereja. Kebutuhan pelayanan disabilitas seperti edukasi kemandirian, sosialisasi dan akses menuju sumber daya yang dibutuhkan adalah urusan pribadi disabilitas dan keluarga, bukan masalah pelayanan gereja, karenanya gereja tidak merumuskan program strategis terkait disabilitas.

Terakhir, disabilitas (dilarang) mengakses pelayanan gereja. Dalam kegiatan sekolah minggu, katekisasi ataupun kegiatan pelayanan gerejawi disabilitas diberikan kesempatan 100% untuk mengaksesnya, meskipun tidak jarang warga jemaat dengan disabilitas dibebaskan dari beban kegiatan katekisasi dan pelayanan sidi. Bagi disabilitas yang hendak terlibat dalam pelayanan terdapat beberapa cacatan yang harus diperhatikan. Majelis Jemaat mengizinkan disabilitas fisik dan mental terlibat aktif, tetapi ada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Keterlibatan disabilitas dalam pelayanan sangat terbatas dan ditempatkan sebagai objek kekaguman, inspirator, motivator ataupun objek “pertunjukan”, tanpa mengubah sikap, perasaan dan pemikiran terhadap disabilitas. Keterlibatan disabilitas tidak didasari oleh semangat persamaan hak dan penghormatan sesama warga gereja dalam prinsip

keragaman, karenanya penting untuk membuka ruang pelayanan yang berbasiskan disabilitas seperti gagasan Ratih Probosiwi dengan menginisiasi “penanggulangan bencana berbasiskan penyandang disabilitas” (Probosiwi, 2013).

PEMBAHASAN

Pentingnya Studi Disabilitas Dalam Gereja

Mengingat disabilitas merupakan kompleksitas yang stereotipe dan stigmatis, dibutuhkan upaya meninjau ulang studi-studi yang sudah dilakukan sekaligus mengubah deskripsi negatif terhadap disabilitas. Studi disabilitas berusaha menjelaskan peran disabilitas dalam keseluruhan struktur pemikiran dan sistem nilai dari sekumpulan teks tertentu pada periode waktu tertentu. Olyan melihat pentingnya studi disabilitas secara biblis mengingat kajiannya yang luas, mencakup ras, kelas, seksualitas dan gender untuk merekonstruksi ide-ide khusus Alkitab Ibrani (PL) yang menjadi dasar gereja tentang apa yang melemahkan dan potensi konsekuensi sosial dari ide-ide tersebut. Disabilitas sebagai kategori analitik memiliki potensi membantu kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang cara-cara penulis Alkitab membangun perbedaan yang signifikan secara hierarkis dan mengistimewakan kelompok-kelompok tertentu, misal mereka yang tidak cacat melampaui mereka yang memiliki cacat. Sekaligus memberikan wawasan tentang cara-cara para penulis Alkitab Ibrani melestarikan atau memodifikasi gagasan Alkitabiah sebelumnya tentang disabilitas dan pola klasifikasi untuk

konteks dan tujuan khusus mereka sendiri (Olyan, 2008). Mengapa gereja perlu studi disabilitas dan mengapa mempelajarinya dalam teks-teks Alkitab? Raphael mengungkapkan pentingnya studi disabilitas dilatarbelakangi pemahaman bahwa, “disabilitas adalah pengalaman riil kehidupan manusia dan Alkitab yang memuat gagasan-gagasan tentang disabilitas merepresentasikan budaya Barat. Keduanya mempunyai pemikiran, perasaan, dan pengalaman panjang dibalik kehidupan mereka” (Raphael, 2008).

Pendekatan Disabilitas

Melihat luas dan kompleksitas studi disabilitas, dibutuhkan kajian yang kompleks dan dinamis, ia tidak hanya bersentuhan dengan disabilitas tubuh sebagai persoalan pribadi, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan nilai-nilai kultural yang menyertainya. Penulis akan menyampaikan beberapa pendekatan kajian disabilitas.

Model medis. Oliver menyebut model medis berkaitan dengan persoalan individual (Oliver, 1996, p. 32). Model ini menyamakan disabilitas dengan gangguan tubuh, disebabkan oleh penyakit, trauma atau persoalan kesehatan yang lain dan mencoba menyembuhkannya dengan analogi penyakit, karenanya medis menyediakan perawatan oleh profesional (Dahlan & Anggoro, 2021; McLean & Williamson, 2007, p. 12).

Implikasi model medis adalah (Raphael, 2008): *pertama*, menempatkan disabilitas sebagai persoalan pribadi dan pada tubuh individu itu sendiri. Model ini memperlakukan orang dengan disabilitas

sebagai yang membutuhkan penyembuhan sebagaimana orang sakit (Anshari, 2020) dan karenanya membutuhkan rehabilitasi (Salsabila et al., 2018). Sama seperti orang sakit yang diisolasi di institusi khusus yang dijalankan otoritas medis, penyandang disabilitas pun diisolasi di lembaga khusus oleh otoritas profesional. *Kedua*, model medis mengaburkan peran praktik sosial yang memperkuat konsekuensi gangguan. Ketika masyarakat hanya berfikir mencari obat untuk kesembuhan disabilitas, mereka mengabaikan hal-hal terkait arsitektur, sarana-prasarana dan layanan publik.

Model sosial. Model sosial memandang disabilitas sebagai produk kegagalan masyarakat mengakomodasi orang dengan kebutuhan khusus. Disabilitas lebih disebabkan oleh pembatasan sosial; minoritas yang ditindas oleh mayoritas; perbedaan fisik menjadi dalih, tetapi penindasan melayani strategi hegemonik. Model ini paling baik dipahami dengan analogi seksisme dan rasisme (Raphael, 2008).

Model sosial “tidak menolak keberadaan disabilitas, melainkan menempatkan disabilitas sebagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat – sosial, memisahkan persoalan *impairment* dengan *disability*, medis dan sosial (Anshari, 2020). Tidak berhubungan dengan keterbatasan individu, tetapi lebih pada kegagalan masyarakat menyediakan layanan yang selayaknya, yang dibutuhkan bagi orang-orang dengan disabilitas. (Oliver, 1996). Disabilitas adalah bentuk

penindasan sosial. Kecacatan tidak dilihat sebagaimana karakter individu melainkan sepenuhnya fenomena sosial yang diproduksi oleh masyarakat.

Model budaya. Pendekatan ini menggabungkan kedua pendekatan terdahulu. Pendekatan budaya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial sebagai dasarnya dan humaniora yang berbasiskan pada study disabilitas (Snyder & Mitchell, 2006). Untuk mempertaruhkan hal-hal tertentu dari epistemologis studi disabilitas dalam model budaya, mereka membandingkan metodenya dengan model sosial (Snyder & Mitchell, 2006) dan kultural bukan model medis atau individualis (Ellis, 2015). Model budaya menaruh perhatian pada penelitian identitas dan analisis budaya secara lebih luas (Ellis, 2015; Snyder & Mitchell, 2006). Disabilitas diyakini sebagai fenomenologis yang tidak murni identik dengan proses sosial yang “menjadikan” seseorang *disabled*, tetapi juga kapasitas biologis yang dapat menghambat kehidupan.

Model Karitas (CBM, 2017). Model karitas berfokus pada persoalan-persoalan individu dan cenderung melihat disabilitas sebagai korban, atau objek belas kasihan, *impairment* mereka menjadi yang utama sebagai identifikasi diri. Disabilitas dipandang sebagai penerima belas kasihan dan manfaat layanan kemanusiaan; sebagai yang pasif, tragis atau menderita dan karenanya membutuhkan pelayanan. Ini mengasumsikan bahwa disabilitas adalah tanggung jawab masyarakat dan merekalah yang mengatur semua layanan untuk orang-orang rentan ini.

Model berbasis hak (CBM, 2017). Model ini didasarkan pada model sosial dan melihat adanya perubahan masyarakat, karenanya perlu model baru dalam mendekati disabilitas. Pendekatan ini berfokus pada perjuangan kesetaraan dan hak yang sama. Prinsipnya, hak asasi manusia adalah hak yang hakiki, yang tidak dapat dicabut dan tidak terpisahkan untuk semua orang dan dijamin oleh negara (Utami, 2019). Disabilitas adalah aktor sentral dalam kehidupan mereka sendiri sebagai pengambil keputusan, warga negara dan pemegang hak. Seperti model sosial, ia berusaha untuk mengubah sistem dan praktik yang tidak adil.

Melihat perkembangan pendekatan sebagai model pelayanan terhadap disabilitas yang terus berkembang tidak menutup kemungkinan, model-model di atas akan mengalami pergeseran paradigma (Santoso & Apsari, 2017) sesuai dengan konteks perjuangannya.

Sikap Gereja terhadap Disabilitas.

Penulis menguraikan sikap gereja terhadap disabilitas dan membaginya menjadi tiga, yaitu penolakan, penerimaan dan ambivalensi.

Penolakan

Penolakan disabilitas lebih dikarenakan oleh: *pertama*, stigma negatif. Pemahaman ini dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman (1963). Stigmatisasi merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap mereka yang dipandang sebagai yang berbeda karena tidak sesuai dengan norma masyarakat mengenai penampilan atau perilaku (Darling,

2013). Stigma mengacu pada perbedaan identitas sosial yang menjadi atribut dan membuatnya berbeda dengan yang lain. Masyarakat umum biasa menetapkan cara mengkategorikan orang dan itu terjadi secara alami untuk setiap anggotanya. Kategori dan atribut yang melekat pada diri mereka itu oleh Goffman disebut dengan "identitas sosial". Dampak kategorisasi, menghadirkan sebuah tuntutan terhadap apa yang dipikirkan, baik dapat dipenuhi maupun tidak terpenuhi sebagaimana yang diasumsikan oleh masyarakat (Goffman, 1963).

Disabilitas dicap untuk memperkuat stigma, seperti halnya stigmatisasi disabilitas dalam Alkitab. Imam yang cacat didiskualifikasi dari pelayanan di bait Suci (Im 21:18-23) dan hewan yang cacat tidak dapat diterima sebagai korban. Dalam pakta perdamaian orang Amon, orang-orang Yabesh-Gilead mencungkil mata kanan mereka sebagai tanda penghinaan (I Sam. 11:2). Demikian pula, Simson dibutakan (Hak. 16:21), seperti halnya Zedekia (II Raja-raja 25:7). Kepincangan dan kebutaan dianggap memalukan (II Sam. 5:6). Gambaran kebutaan dan tuli, dalam beberapa contoh, merupakan metafora untuk ketidakpedulian terhadap permohonan moral, cerminan lain dari stigmatisasi kecacatan. (Marx, pp. 53). Olyan melihat disabilitas dalam teks-teks Alkitab sebagai stigmatisasi dan posisi marjinal karena kondisi fisik atau mental (Olyan, 2008). Kerry Wynn dalam "Johannine Healings and the Otherness of Disability" dengan tegas memberikan pernyataan, "*Dua asumsi paling umum dalam teologi populer yang meminggirkan penyandang disabilitas adalah 1) disabilitas*

disebabkan oleh dosa, dan 2) jika seseorang memiliki cukup iman, ia akan disembuhkan.” (Soles, 2018).

Kedua, marginalisasi. Mclean-Williamson menentang upaya melindungi kepentingan penyandang disabilitas dengan menghadirkan mereka sebagai kelompok masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya. Karena dengan cara yang demikian justru akan mengkarakterisasi (baca: mengkonstruksi) mereka sebagai kelompok yang rentan, rapuh dan layak untuk diisolasi sebagaimana stereotipe yang diterimanya. Orang-orang dengan disabilitas sudah semestinya diberikan kesempatan penuh untuk terlibat dalam partisipasi sosial (McLean & Williamson, 2007).

Ketiga, disabilitas sama dengan produk ekonomi. Albrecht dalam *The Disability Business: Rehabilitation in Amerika* (1992) menyatakan faktor ekonomi juga patut diperhatikan dalam mengkaji disabilitas. Ini menunjukkan tidak jauh berbeda dengan argumen seperti humberger, KFC, McDonald dan kendaraan bermotor, “disabilitas” ditransformasikan sebagai sebuah “barang”, sebuah produk dengan nama “bisnis disabilitas” bersama dengan rangkaian teknik untuk pengobatan, manajemen dan rehabilitasi (Rapley, 2004, p. 63). Terkait dunia materialis yang melihat disabilitas sebagai sebuah produk, Barnes dan Oliver (1993) berpendapat secara ideologis konsepsi disabilitas dalam masyarakat kapitalis – individu dengan disabilitas disebut dengan “teori tragedi individu” (*personal tragedy theory*) – menempati peran yang penting bagi industri. Secara ideologi akan terus menghegemoni “teori tragedi individu” baik pada level

personal maupun struktural. Dengan demikian secara inheren disabilitas dilihat sebagai korban yang patut untuk dipersalahkan dan pembenaran bagi kaum profesional. Orang dengan disabilitas sangat memungkinkan mengalami kegagalan, karena dianggap memiliki kekurangan secara fisik maupun intelektual dan karenanya mereka “dibebaskan” dari tanggungjawab, integritas profesional dan tradisional (Rapley, 2004).

Penerimaan

Sikap sebaliknya gereja terhadap disabilitas dapat dilihat dalam refleksi atas pernyataan Yesaya kepada para kasim, orang-orang yang dikebiri dan karenanya merasa dikucilkan dari perjanjian yang tidak dapat mempertahankan mereka karena tidak memiliki anak. Sikap *empati* Yesaya sudah semestinya menjadi cerminan gereja dewasa ini, “Sebab beginilah firman Tuhan: “Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabat-Ku dan yang memilih apa yang Kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjian-Ku, kepada mereka akan Kuberikan dalam rumah-Ku dan di lingkungan tembok-tembok kediaman-Ku suatu tanda peringatan dan nama... suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan Kuberikan kepada mereka” (Yes 56:3-5).

Sikap empati ini dapat diwujudkan dalam tindakan nyata dengan mengusung “gereja inklusi” (Innawati, 2021), gereja yang membuka diri bagi perbedaan gender, pendidikan, strata sosial, bahasa, suku, bangsa dan termasuk di dalamnya menerima dengan terbuka orang-orang

dengan disabilitas, “memberikan mimbar kepada kaum disabilitas” (Miraji, 2021).

Ambivalen

Semua partisipan sepakat bahwa pelayanan terhadap disabilitas harus dilakukan berdasar prinsip kesetaraan. Tidak ada perbedaan rasial, warna kulit, gender, termasuk disabilitas ataukah non-disabilitas (band. Gal 3:28). Tetapi keterlibatan disabilitas dalam pelayanan tetap dibatasi dengan aturan-aturan yang dibangun berdasar kriteria kenormalan. Misal, orang yang mengalami kesulitan bicara dapat menjadi *singer* gereja, jikalau bicaranya lancar. Inilah sikap ambivalensi yang ditunjukkan oleh gereja. Satu sisi membuka akses sumber daya, tetapi di sisi yang lain membatasi keterlibatan mereka. Secara moral gereja mengajarkan kebebasan tetapi sekaligus bertingkah diskriminatif dan stigmatis.

Membuka Aksesibilitas disabilitas dalam Pelayanan Gereja.

Meneliti akar biblis disabilitas

Gereja seharusnya menjadi motor perjuangan kaum disabilitas mendapatkan akses dan perannya dalam masyarakat. Harapan tersebut diwujudkan dengan cara: *pertama*, meneliti akar biblis disabilitas. Olyan, Marx, dan Creamer megngatkan, gereja perlu melihat ke belakang, bagaimana Alkitab berbicara tentang disabilitas. Tidak mudah untuk melakukan studi ini, tetapi harus dilakukan untuk mengurai pesan teks Alkitab yang membebaskan kaum disabilitas. Sepakat dengan Mitchell dan Snyder dalam Raphael (Raphael, 2008) perihal studi disabilitas.

Untuk meneliti akar biblis disabilitas perlu memperhatikan lima hal: *Pertama*, studi disabilitas dapat memfokuskan diri pada survey dan kritik terhadap citra negatf yang ditanamkan. Dilakukan inventarisasi untuk menemukan kesimpulan atas fenomena yang ada.

Kedua, sebagai koreksi atas citra negatif di atas, dipandang perlu memberikan perhatian pada ketidakakuratan representasi disabilitas dan mencoba memberikan representasi yang tepat, akurat. Misal kisah tentang kepincangan Yakub. Narator tidak memberikan penjelasan yang memadai bagaimana Yakub menjalani aktivitas sehari-harinya setelah setelah mengalami kepincangan di Pniel (Kej 32:31). Apakah tidak adanya representasi ini berarti pincang (pada diri Yakub) itu bersifat sementara atau hanya karena perhatian penulisnya yang sepintas lalu mengingat Bilangan 23:21 menyampaikan, “Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub...” Banyak pertanyaan yang mungkin tidak dapat diselesaikan.

Ketiga, membangun historisme baru dalam studi disabilitas untuk merekonstruksi pemahaman disabilitas dalam periode dan konteks sosial yang berbeda. Dalam kaitannya dengan Alkitab Ibrani, ketegangan antara perkembangan sejarah dan dampak sejarah yang menjiwai setiap penyelidikan istilah-istilah penting dalam budaya, misal hal yang terkait dengan hubungan kecacatan dengan gagasan tentang Tuhan.

Keempat, kritik biografi (*biographical criticism*). Mitchel dan Snyder mengatakan, “secara kanonikal banyak penulis yang mengalami *disable*,

memiliki keterbatasan (*impairments*), namun kanonitas menghapus mereka (Raphael, 2008). Perspektif terakhir yang dimunculkan Mitchel dan Snyder adalah adanya keterlibatan unsur politis. Diskusi ini merupakan hal yang sulit, tetapi penting untuk dilihat secara historis adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Edukasi disabilitas

Edukasi disabilitas adalah sebuah kegiatan yang melibatkan dan ditujukan bagi seluruh *stake holder* gereja dan masyarakat, baik orang-orang dengan disabilitas maupun non-disabilitas. Edukasi tersebut dapat dimulai dengan kegiatan dan aktivitas yang sederhana, seperti membiasakan penggunaan “kata-kata” yang merujuk kepada disabilitas secara positif. Tidak lagi menyebut orang-orang dengan disabilitas sebagai “orang cacat” ataupun “orang tidak normal”, mengingat penyebutan tersebut bermakna stigmatis dan stereotipe.

Melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam pelayanan gereja

Sampai dengan hari ini dapat dikatakan bahwa hampir semua gereja belum melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam kegiatan gerejawi, meskipun ada yang melibatkan, masih sangat terbatas dan dalam momen-momen tertentu, itupun dalam situasi yang sangat terbatas. Keterlibatan orang-orang dengan disabilitas dalam pelayanan gereja, akan sangat mempengaruhi pandangan teologis dan praktik pelayanan di jemaat. Contoh, orang dengan disabilitas harus terlibat dalam perumusan

pelayanan gereja, menjadi subjek pelayanan, bukan sebaliknya hanya menjadi objek pelayanan. Kaum disabilitas mesti turut menentukan langkah juangnya demi menghadirkan kesetaraan dalam gereja.

Pelayanan inklusi

Selama ini gereja memfokuskan pelayanan dalam bentuk kategorisasi. Dapat diperhatikan dalam pembentukan komisi atau badan pelayanan yang ada, seperti komisi wanita, komisi bapak, komisi orang tua, komisi pemuda, komisi anak dan remaja, komisi lanjut usia ataupun kategorisasi yang lain terkait profesionalisme tertentu, seperti komisi karyawan, komisi kesehatan atau komisi-komisi yang lain. Di antara komisi dan badan yang terbentuk, pertanyaannya adakah komisi intergenerasi atau komisi yang terbuka dari setiap kategorisasi yang ada. Pelayanan yang melibatkan seluruh elemen gereja yang tidak lagi mengutamakan gender dan profesionalitas. Semangat keterbukaan pelayanan akan membuka peluang untuk melibatkan secara aktif bagi orang-orang dengan disabilitas.

KESIMPULAN

Disabilitas merupakan kajian yang kompleks dan multidimensional, membutuhkan booster sebagai daya dobrak pada dimensi pribadi, sosial dan menyentuh akar budaya dan tradisi. Diskusi disabilitas tidak dapat hanya dilakukan dalam satu sudut pandang tertentu tetapi membutuhkan kerjasama lintas ilmu, sektoral dan lembaga. Gereja mempunyai panggilan

untuk menghadirkan kesetaraan. Secara teologis persekutuan gereja melampaui batas-batas teritorial, rasial, gender, warna kulit termasuk diantaranya orang-orang dengan disabilitas dan non-disabilitas. Gereja perlu membuka diri, bergerak dari pelayanan yang memfokuskan pada kategorisasi menuju pelayanan inklusi; dari memahami disabilitas secara negatif menuju keterbukaan dan menerima keragaman manusia yang setara; dari tidak memberi pintu akses pelayanan menuju melibatkan disabilitas dalam berteologi dan berpelayanan dalam partisipasi sosial – gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. (2020). Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur. *Modernity: Jurnal Pendidikan Dan Islam Kontemporer*, 1(1), 35–40.
- CBM. (2017). *Disability Inclusive Development Toolkit*.
- Creamer, D. B. (2009). *Disability and Christian Theology Embodied Limits and Constructive Possibilities*. Oxford University Press.
- Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48>
- Darling, R. B. (2013). *Disability and Identity: negotiation self in a changing society*. Lynne Rienner Publisher.
- Demartoto, A. (2007). *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. LPP-UNS Press.
- Devi, Ivan, & Rumbi, F. P. (2021). Peran Gereja dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Gereja Toraja Jemaat Kaero. *Kinaa: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 2(1), 57–67. <https://doi.org/10.34307/kinaa.v2i1.26>
- Ellis, K. (2015). *Disability and Popular Culture: Focusing Passion, Creating Community and Expressing Defiance*. Ashgate Publishing Company.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: notes on the management of spoiled identity*.

Englewood Cliffs.

- Innawati. (2021). Pemuridan pemberdayaan Bagi Jemaat Disabilitas Dalam Pelayanan Mimbar Di Gereja Inklusif (Sebuah Penelitian Eksperimen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Bukit Sion Mangliawan). *Jurnal Amanat Agung*, 17(1), 88–119. <https://doi.org/10.47754/jaa.v17i1.457>
- Karnawati. (2020). Pemahaman dan Kontribusi Gereja Terhadap Hak Penyandang Disabilitas. *Indonesian Conference on Religion and Peace - Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI)*, 1, 122–131.
- Karuniasih, N. N. M. P., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2017). Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1).
- Lawson, W. (2008). *Concepts Of Normality*. Jessica Kingsley Publishers.
- Marx, T. C. (2002). *Disability In Jewish Law*. Routledge.
- McLean, S. A. M., & Williamson, L. (2007). *Impairment and Disability: law and ethics at the beginning and end of life*. Routledge-Cavendish.
- Miraji, T. (2021). Pandangan Teologis Terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini. *SAGACITY Journal of Theology and Christian Education*, 1(2), 65–86.
- Oliver, M. (1996). *Understanding Disability: From Theory to Practice*. Macmillan Education.
- Olyan, S. M. (2008). *Disability in the Hebrew Bible*. Cambridge University Press.
- Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana (Person With Disabilities Involvement On Disaster Prevention). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 77–86.
- Putra, R. S., Marpaung, Y. N. M., Pradhana, Y., & Rimbananto, M. R. (2021). Pesan Kesetaraan Penyandang Disabilitas Melalui Interaksi Simbolik Media Sosial. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.1-11>
- Raphael, R. (2008). *Biblica Corpora: Representations of Disability in Hebrew Biblical Literature*. T & T Clark International.
- Rapley, M. (2004). *The Social Construction of Intellectual Disability*. Cambridge University Press.
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2018). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(1), 190–203. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166–

176. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>

- Sinulingga, I. N. (2016). Disabilitas sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Retardasi Mental dalam Peziarahan Normalisme. In R. Arulangi, H. A. Harmakaputra, N. Sasongko, & A. S. Wilar (Eds.), *Dari Disabilitas ke Penebusan* (pp. 1–23). BPK Gunung Mulia.
- Snyder, S. L., & Mitchell, D. T. (2006). *Cultural Locations of Disability*. The University of Chicago Press.
- Soles, J. C. (2018). *Disability and the Bible*. The Christian Citizen. <https://medium.com/christian-citizen/disability-and-the-bible-343f4f788744>
- Subasno, Y., Kaka, I. A., & Yulius, M. I. (2020). Pengetahuan dan Sikap Umat Katolik terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lingkungan St. Filemon Paroki Blimbing Keuskupan Malang. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 5(2), 55–76. <https://doi.org/10.53544/sapa.v5i2.134>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sweety. (2021). Sekolah Minggu Ramah Anak: Menuju Arah Baru sekolah Minggu yang Peduli Anak dengan Disabilitas. In H. A. Harmakaputra, K. Diredja, & M. Alexander (Eds.), *Meretas Polarisasi Pendidikan Kristiani* (pp. 73–99). BPK Gunung Mulia.
- Teddywono, I. (2020). Pemuridan Bagi Jemaat Penyandang Disabilitas. *Sanctum Domine Jurnal Teologi*, 10(1), 17–34. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v10i1.82>
- Utami, T. K. (2019). Penyandang disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 131–139. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2102>
- WHO. (2015). *WHO Global Disability Action Plan 2014-2021 Better Health for All People with Disability*.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(20), 127–142. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i2.239>
- Widyastutik, C. (2021). Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Jurnal Paradigma*, 10(1).
- World Bank and World Health Organisation. (2011). *World Disability Report*.
- Zendrato, R. A. (2018). *Gereja dan Penyandang Disabilitas*. Sekolah Tinggi Amanat Agung.